



**Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

# **STRATEGI Menuju Kategori BB dan A**

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

## PRASYARAT MENUJU PREDIKAT BB & A

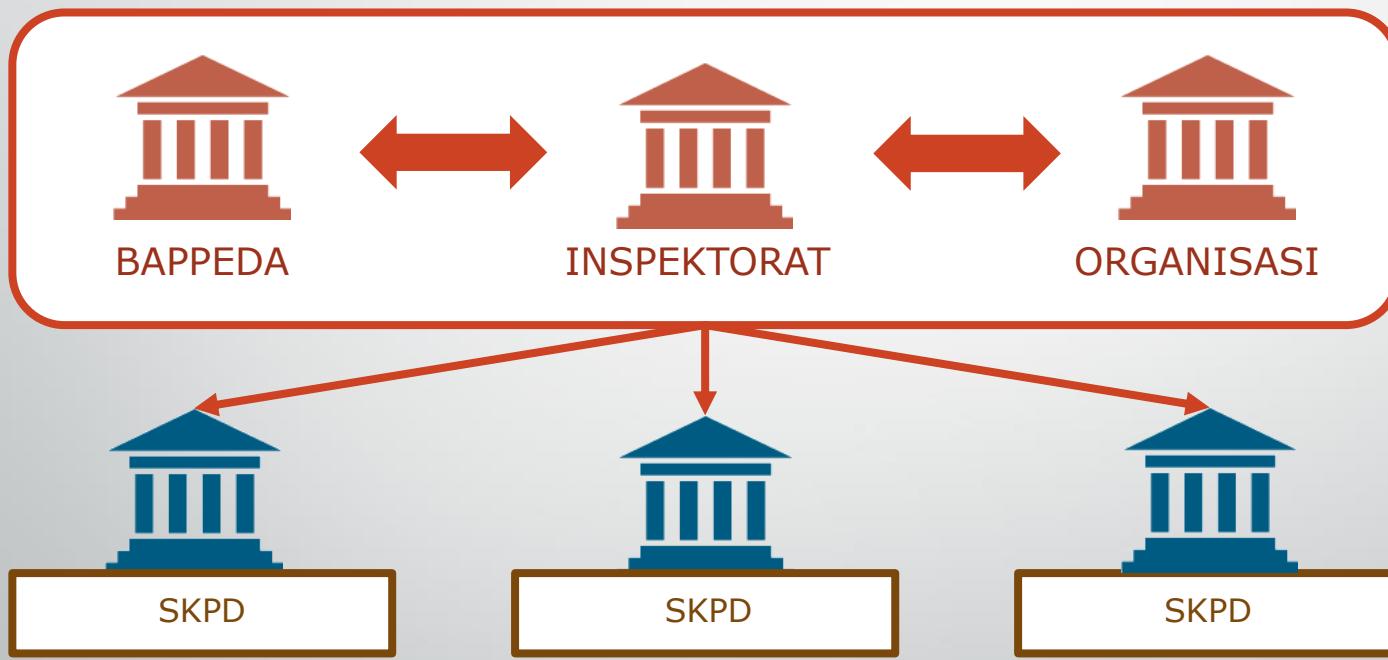


# KONTRIBUSI SAKIP OPD YANG BAIK HARUS SEMAKIN BESAR

# MINIMUM REQUIREMENT PADA PEMBERIAN KATEGORI HASIL EVALUASI SAKIP

No.	ITEM	AA	A	BB	B
1	Manajemen SAKIP	Kepala Daerah harus mampu menjelaskan SAKIP	Kepala Daerah harus mampu menjelaskan SAKIP	Kepala OPD harus terlibat & mampu menjelaskan SAKIP di OPDnya	Cukup delegasi ke Sekretaris OPD
2	Jumlah Sampling unit kerja	100%	100%	75%	50%
3	Indikator Kinerja Utama: (Pemda dan Unit Kerja)	Ada dan Baik	Ada dan Baik	Ada dan Baik	Ada
4	Unit Kerja yang sudah baik implementasi SAKIP nya	100%	100%	2/3 Populasi	1/3 Populasi
5	Cascade down IKU	100% hingga ke level individu dan sudah baik	100% hingga ke level Struktural terendah dan sudah baik	50% hingga level struktural terendah dan sudah baik	Hanya yang wajib
6	Aplikasi SAKIP secara elektronik	Harus ada	Harus ada	Harus ada	Belum perlu
7	Budaya Kinerja	Sudah diimplementasikan di seluruh unit kerja	Sudah diimplementasi	Sudah mulai diimplementasi	X

# Koordinasi dan Pembinaan

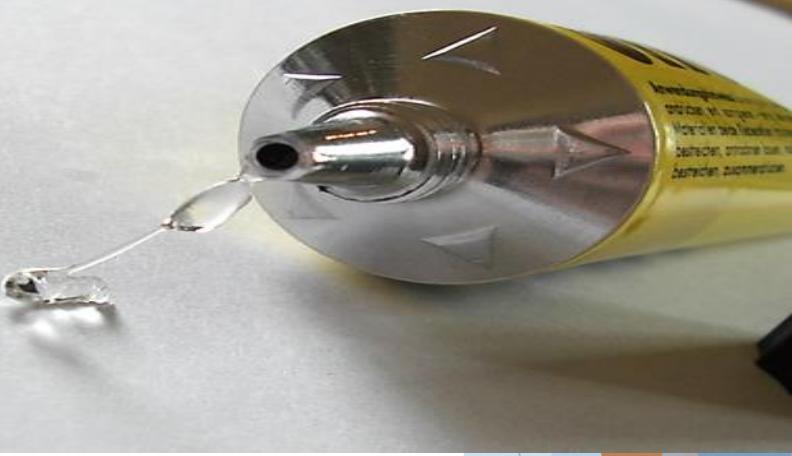


# **KOMITMEN PIMPINAN TERTINGGI**



**Accountability**  
is the glue that ties  
commitment to the result

*Bob Proctor*



# MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA



Perubahan **pola pikir** atau **paradigma** yang berorientasi pada kinerja dan **komitmen** seluruh jajaran organisasi terutama **pimpinan** untuk menerapkan **manajemen kinerja, peningkatan kompetensi SDM, dan pengembangan data kinerja (IT-based)**)

# KOMITMEN PIMPINAN TERTINGGI

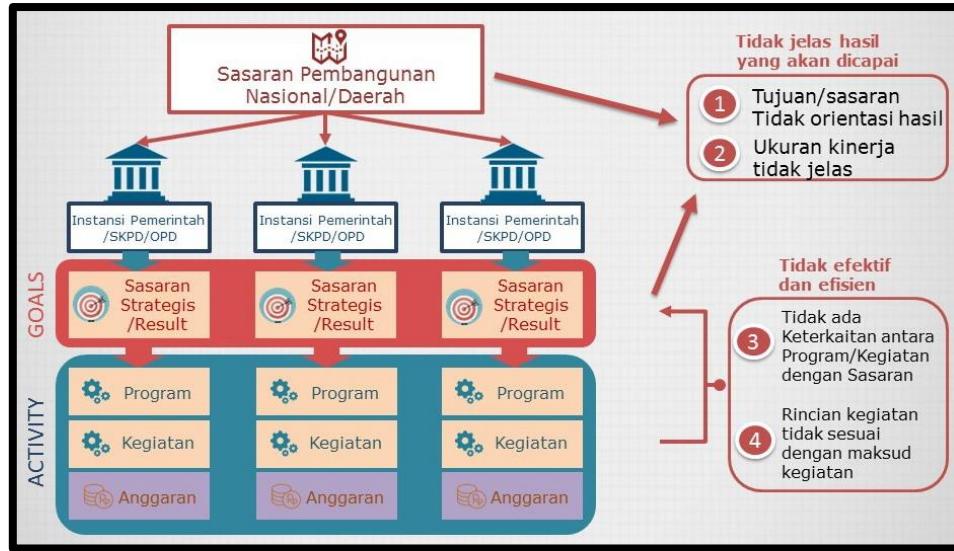
**Untuk Nilai Akuntabilitas Kinerja Kategori BB ke atas**



**Kepala Daerah ybs mampu:**

- Memberikan presentasi langsung mengenai perkembangan implementasi SAKIP pada daerah yang dipimpinnya;
- Terlibat langsung dalam perbaikan implementasi SAKIP;
- Menggerakkan seluruh Kepala OPD dalam proses perbaikan implementasi SAKIP;
- Menggunakan “tangan besi” (apabila diperlukan) terhadap Kepala OPD ataupun pihak lain yang tidak mendukung proses perbaikan implementasi SAKIP.

# MANAJEMEN BERBASIS KINERJA



Good Governance

Result Oriented Government

Clarity about objectives (Outcomes)

SASARAN TIDAK ORIENTASI HASIL 1

Information on results (performance indicators)

UKURAN KINERJA TIDAK JELAS 2

Targets for results

PROGRAM/KEGIATAN TIDAK TERKAIT DNG SASARAN 3

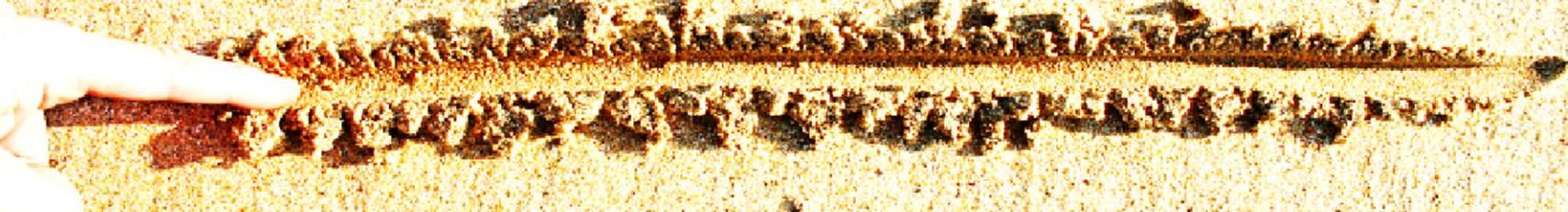
Link between objectives and means

RINCIAN KEGIATAN TIDAK SESUAI DNG MAKSUD KEGIATAN 4

# CASCADING KINERJA

# KINERJA VS KERJA

KINERJA.

- Kondisi positif yang ingin diwujudkan
  - Kondisi Negatif yang ingin dihilangkan
  - Tujuan
  - Sasaran
  - Outcome
  - Hasil
- 
- KERJA
- Strategi/cara untuk mencapai kinerja
  - Program, Kegiatan, Sub-kegiatan, komponen, dan anggaran

# PENERAPAN KINERJA vs KERJA

## KINERJA

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET

## KERJA

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN

# PENGERTIAN

1. A small waterfall, typically one of several that fall in stages down a steep rocky slope

1.1 A mass of something that falls or hangs in copious quantities

2. A process whereby something, typically information or knowledge, is successively passed on

(Sebuah proses di mana sesuatu, biasanya berupa informasi atau pengetahuan, yang diteruskan secara berturut-turut)

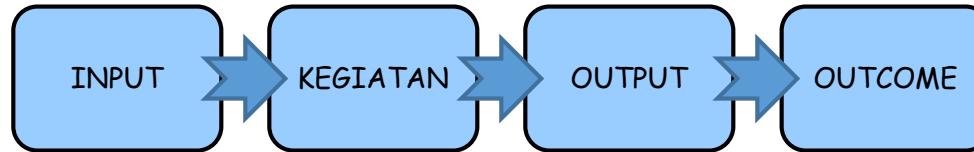
- 2.1 A succession of devices or stages in a process, each of which triggers or initiates the next.

(Urutan perangkat atau tahapan dalam sebuah proses, yang masing-masing memicu atau memulai yang berikutnya)

(Oxford Dictionary)

# POLA PROGRAM LOGIC

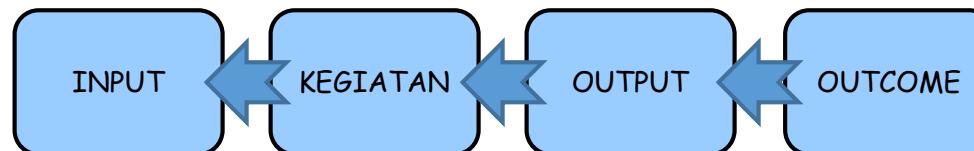
---- MEANS ----



---- ENDS ----

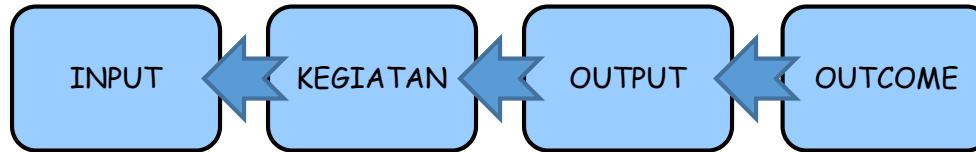


PERFORMANCE BASED PLANNING  
DIMULAI DARI HASIL YANG INGIN  
DICAPAI, BUKAN DARI INPUT YANG  
DIMILIKI



# POLA PROGRAM LOGIC

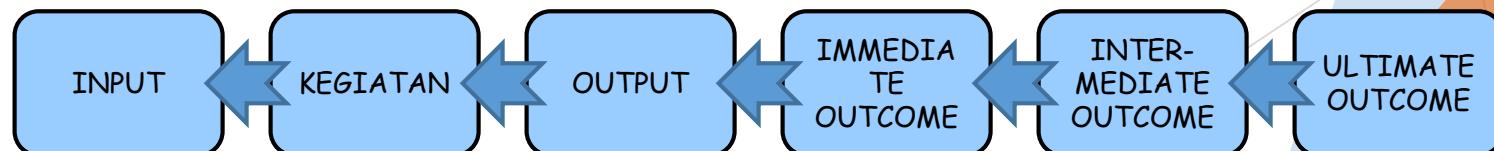
---- MEANS ----



---- ENDS ----

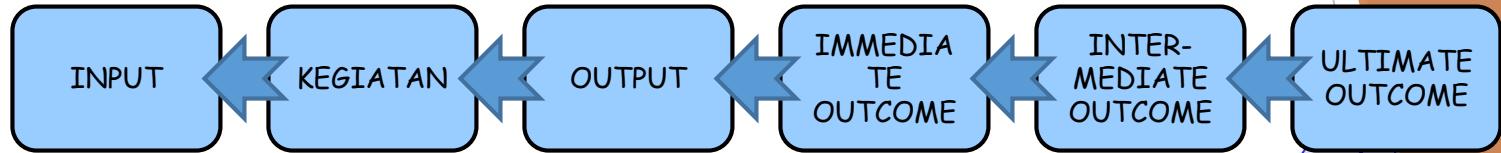


UNTUK MENGHASILKAN OUTCOME  
TIDAK BISA LANGSUNG OUTPUT.  
TERDAPAT SERANGKAIAN OUTCOME  
ANTARA YANG MENJEMBATANI  
OUTCOME AKHIR DENGAN OUTPUT



# POLA PROGRAM LOGIC

---- MEANS ----

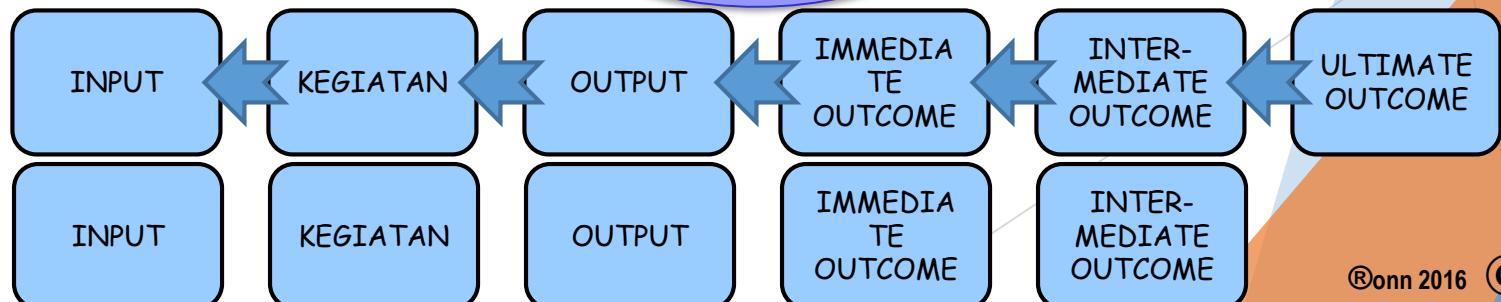


---- ENDS ----

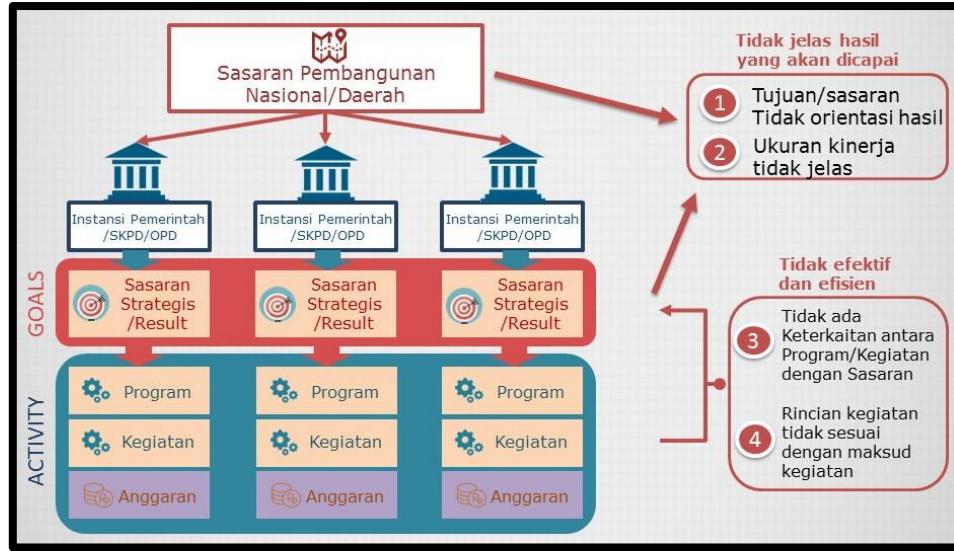


VARIABEL YANG MENYEBABKAN  
OUTCOME TIDAK SELALU LINIER  
HANYA BERASAL DARI SATU INPUT.

OUTCOME BIASANYA TERJADI DARI  
KOMBINASI BERBAGAI OUTCOME  
YANG LEBIH RENDAH, OUTPUT,  
PROSES KEGIATAN, DAN INPUT



# MANAJEMEN BERBASIS KINERJA



Good Governance

Result Oriented Government

Clarity about objectives (Outcomes)

SASARAN TIDAK ORIENTASI HASIL 1

Information on results (performance indicators)

UKURAN KINERJA TIDAK JELAS 2

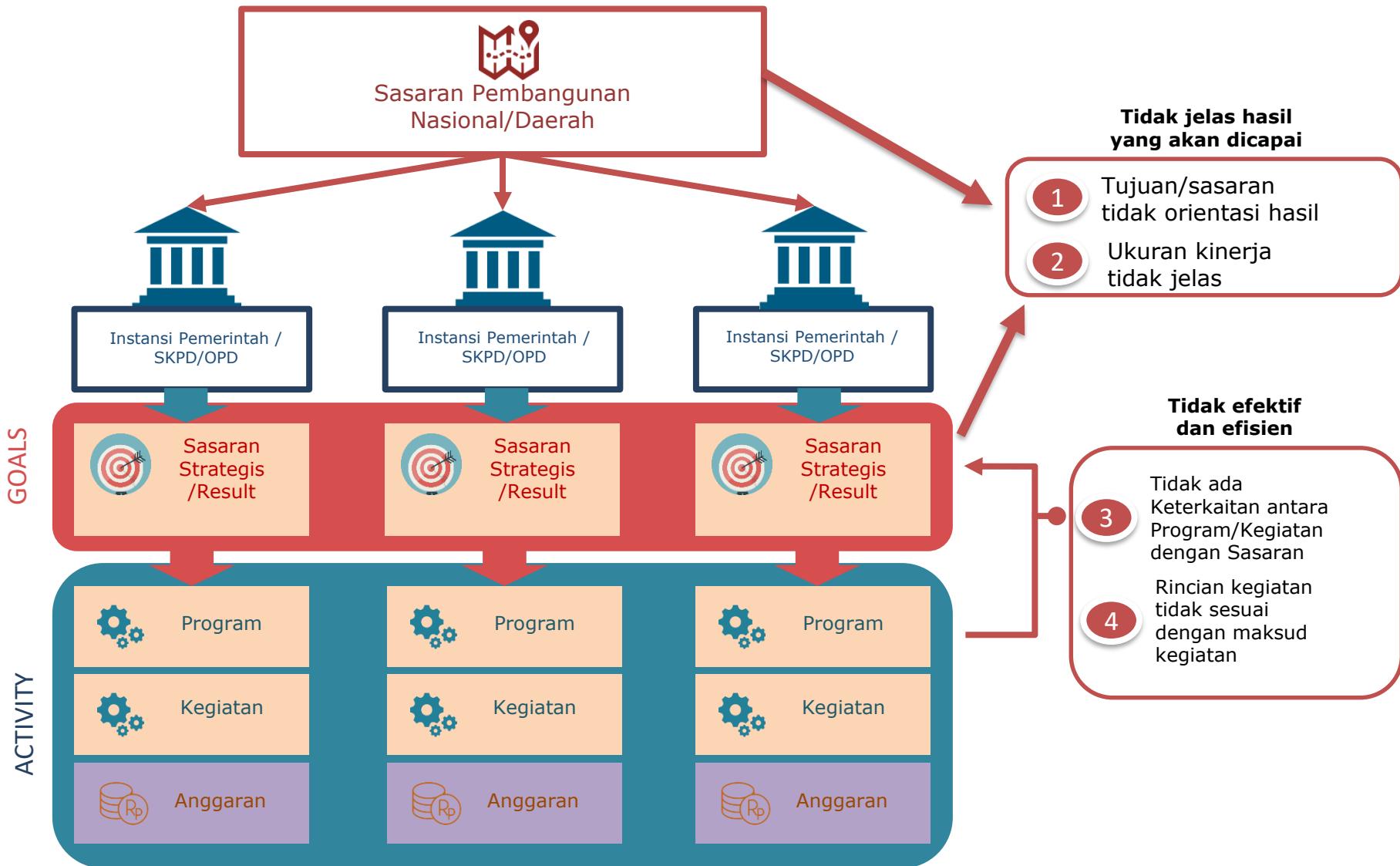
Targets for results

PROGRAM/KEGIATAN TIDAK TERKAIT DENGAN SASARAN 3

Link between objectives and means

RINCIAN KEGIATAN TIDAK SESUAI DENGAN MAKSUMD KEGIATAN 4

# PERMASALAHAN YANG SERING TIMBUL



# PROGRAM DAN KEGIATAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

1

Pastikan Tujuan/Sasaran/Outcome berorientasi hasil, jelas, dan terukur

Outcome yang tidak jelas, tidak bisa dipahami, dan sulit diukur akan mempersulit proses analisis dan penyusunan program kegiatan

2

Tentukan faktor-faktor pendukung tercapainya

**Tujuan/Sasaran/Outcome (tentukan outcome kecilnya untuk menuju outcome yang lebih besar)**

Kondisi keberhasilan apa yang dibutuhkan dalam rangka mencapai outcome instansi?

3

Rancang proses bisnis yang harus dilalui/dilakukan untuk mencapai outcome kecil tersebut

4

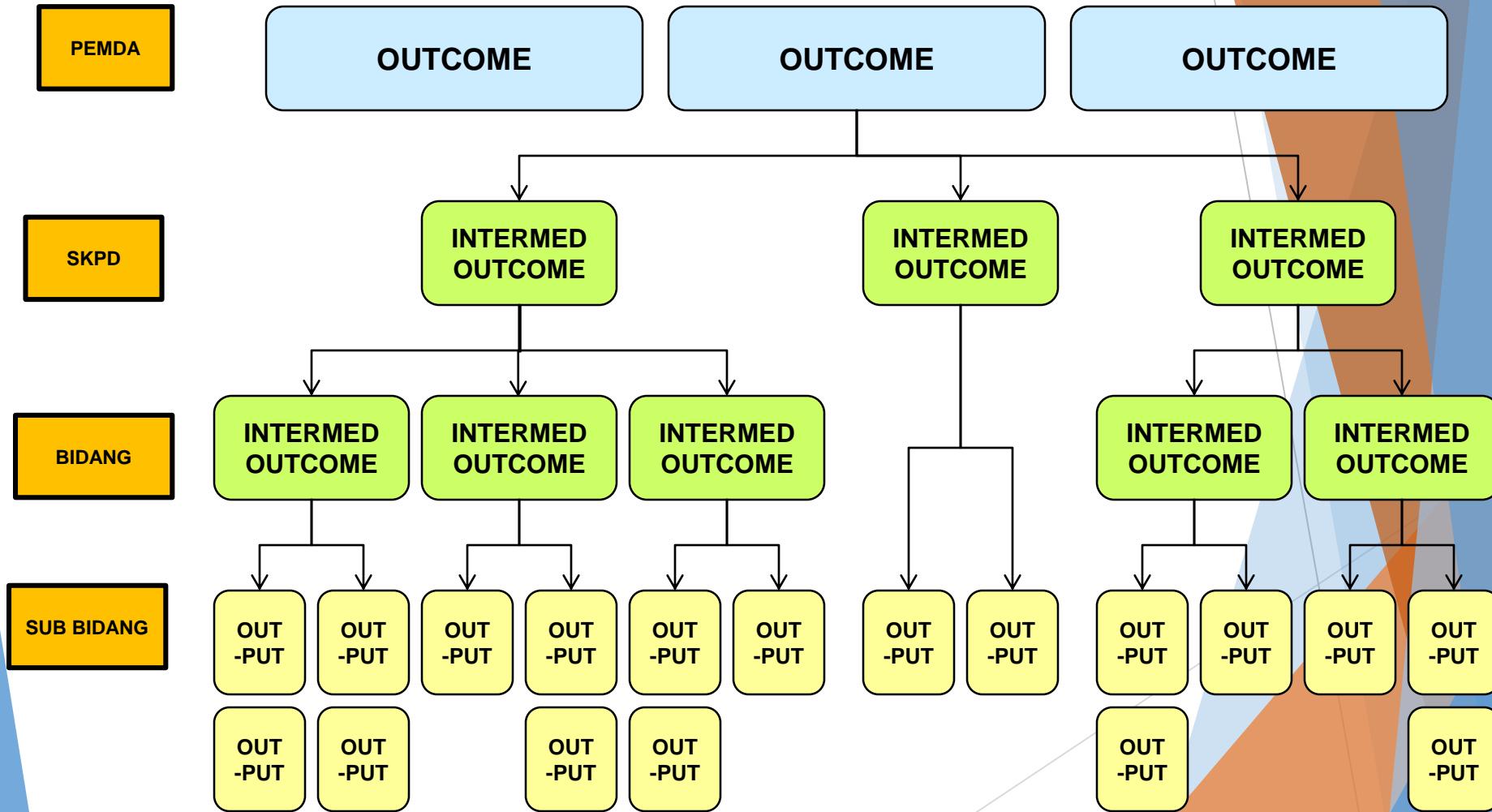
Jabarkan outcome kecil dan proses bisnis ke dalam Program, kegiatan dan anggaran

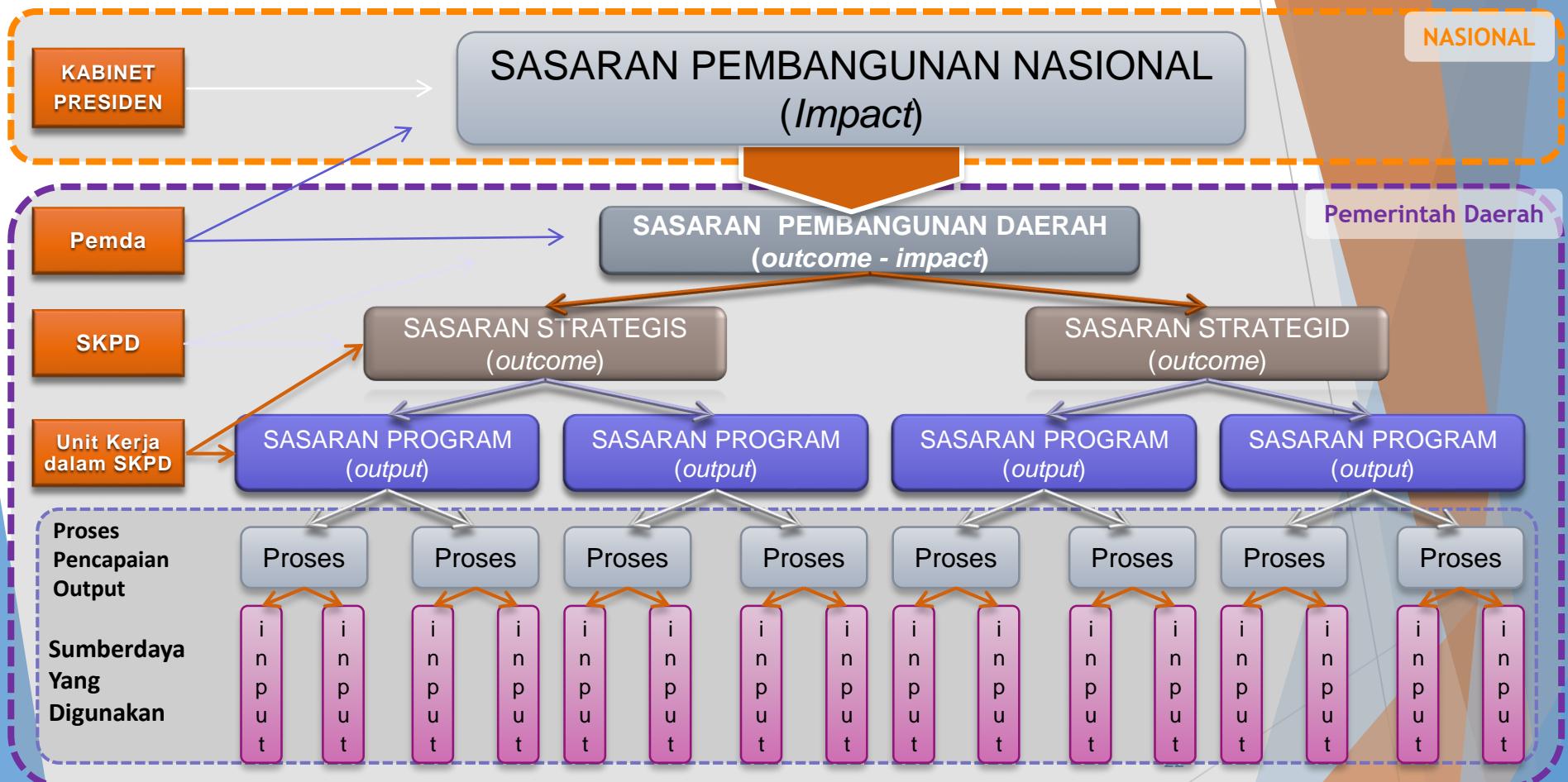
Outcome kecil = sasaran program,  
Proses bisnis = kegiatan



lokasi anggaran tidak didasarkan pada jabatan, tetapi pada kegiatan yang menunjang sasaran strategis

# POHON KINERJA





NASIONAL

Pemerintah Daerah

Coaching

# AKUNTABILITAS KINERJA BAIK

## PERENCANAAN KINERJA BAIK

PEMANFAATAN  
PERENCANAAN

CASCADING KINERJA BAIK

RENST  
RA  
BAIK

PK  
BAIK

RENC  
NA  
AKSI  
BAIK

PEMENUHAN  
PERENCANAAN

## PENGUKURAN KINERJA BAIK

PEMANFAATAN  
PENGUKURAN

MONITORING KINERJA BAIK

IKU  
BAIK

IK  
INDIVI  
DU  
BAIK

PEMENUHAN  
PENGUKURAN

## PELAPORAN KINERJA BAIK

PEMANFAATAN  
PELAPORAN

INTERPRETASI DAN  
AKUNTABILITAS KINERJA BAIK

DATA  
BAIK

INFOR  
MASI  
KINER  
JA  
BAIK

PEMENUHAN  
PELAPORAN

## EVALUASI KINERJA BAIK

PEMANFAATAN  
EVALUASI

FEEDBACK KINERJA BAIK

EVALU  
ASI  
AKIP  
BAIK

EVALU  
ASI  
PROG  
RAM  
BAIK

PEMENUHAN EVALUASI

KEBIJAKAN  
BAIK

DELIVERY  
KEBIJAKAN  
BAIK

IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN

PEMATERI BAIK

E-APLIKASI  
BAIK

DATA BAIK

INFORMASI

EVALUASI AKIP  
BAIK

INSTRUMEN  
EVALUASI BAIK

EVALUATOR  
BAIK

EVALUASI  
KEBIJAKAN

# Alternatif Cascade Indikator Kinerja

## Tingkatan Organisasi

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Individu

## Indikator Kinerja

- Outcome
- Output (penting)

- Outcome
- Output (penting)
- Output (kegiatan)

- Output (kegiatan)
- Proses

- Proses
- Input

# **RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA**

# Latar Belakang

1

Perjanjian Kinerja (PK) selama ini lebih banyak bersifat formalitas saja, dalam arti hanya sekedar memenuhi kewajiban dan belum dimanfaatkan secara optimal;

2

Setelah PK ditandatangani, biasanya dokumen PK dimaksud disimpan saja dan baru dilakukan pengukuran realisasinya pada saat penyusunan LKIP.

3

Pada saat pengukuran kinerja tersebut barulah kita terkaget-kaget karena realisasinya jauh dibawah target atau berkali2 lipat daripada yang ditargetkan;

4

Untuk itu diperlukan suatu rencana aksi pencapaian kinerja yang berfungsi sebagai alat pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

# Hakikat Rencana Aksi

1

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ke dalam kerangka waktu yang lebih pendek (misalnya triwulan);

2

Rencana aksi sekurang-kurangnya memuat kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai kinerja beserta anggaran yang tersedia;

3

Kementerian PANRB tidak menetapkan bentuk/format Rencana Aksi Pencapaian Kinerja tertentu, tetapi diserahkan ke masing2 Instansi Pemerintah;

4

Rencana aksi dapat diterapkan dalam bentuk :  
a. Manual  
b. Aplikasi sistem informasi

# Contoh Formulir Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN (AKTIVITAS)					KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGG.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
SASARAN 1	IK 1A	TW 1: ...	PROG 1	KEGIATAN A			TW 1: ...		
		TW 2: ...							
		TW 3: ...							
		TW 4: ...							
	IK 1B	TW 1: ...	PROG 2	KEGIATAN B			TW 1: ...		
		TW 2: ...							
		TW 3: ...							
		TW 4: ...							
©coaching2006									

# **PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KINERJA BERBASIS ELEKTRONIK**

# Sistem Informasi Manajemen Kinerja



## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KINERJA



# Keuntungan Penggunaan Aplikasi SAKIP Berbasis Elektronik

- 1 Mempercepat proses penyusunan laporan kinerja, baik tingkat Kab/Kota maupun tingkat Perangkat Daerah;
- 2 Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja dan laporan kinerja serta keandalan data kinerja;
- 3 Dapat memantau kinerja setiap saat (real time), sehingga pimpinan dapat menilai kinerja OPD maupun bawahannya setiap saat;



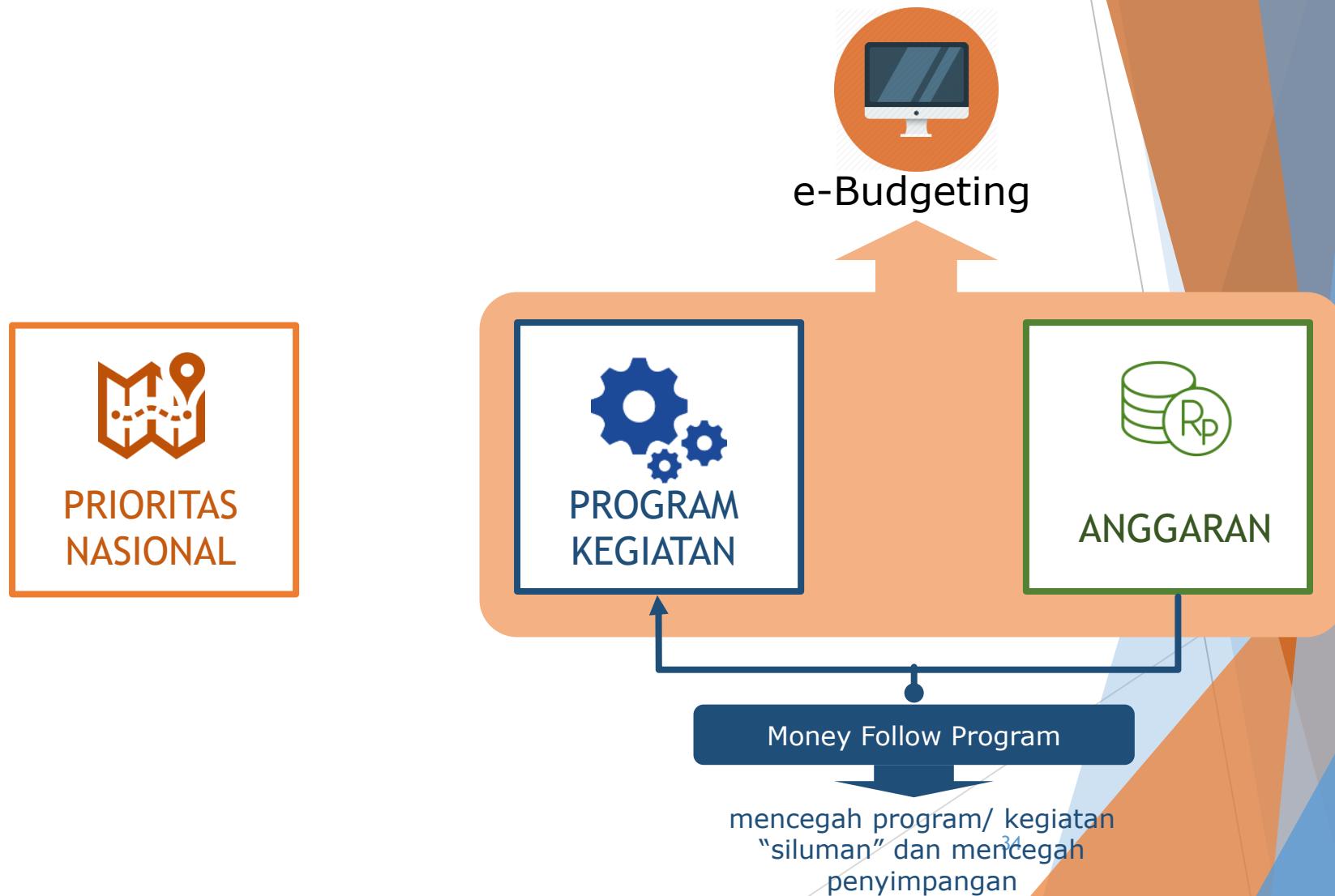
# **MULAI MENERAPKAN *E-PERFORMANCE BASED BUDGETING***

# ANGGARAN BERBASIS KINERJA

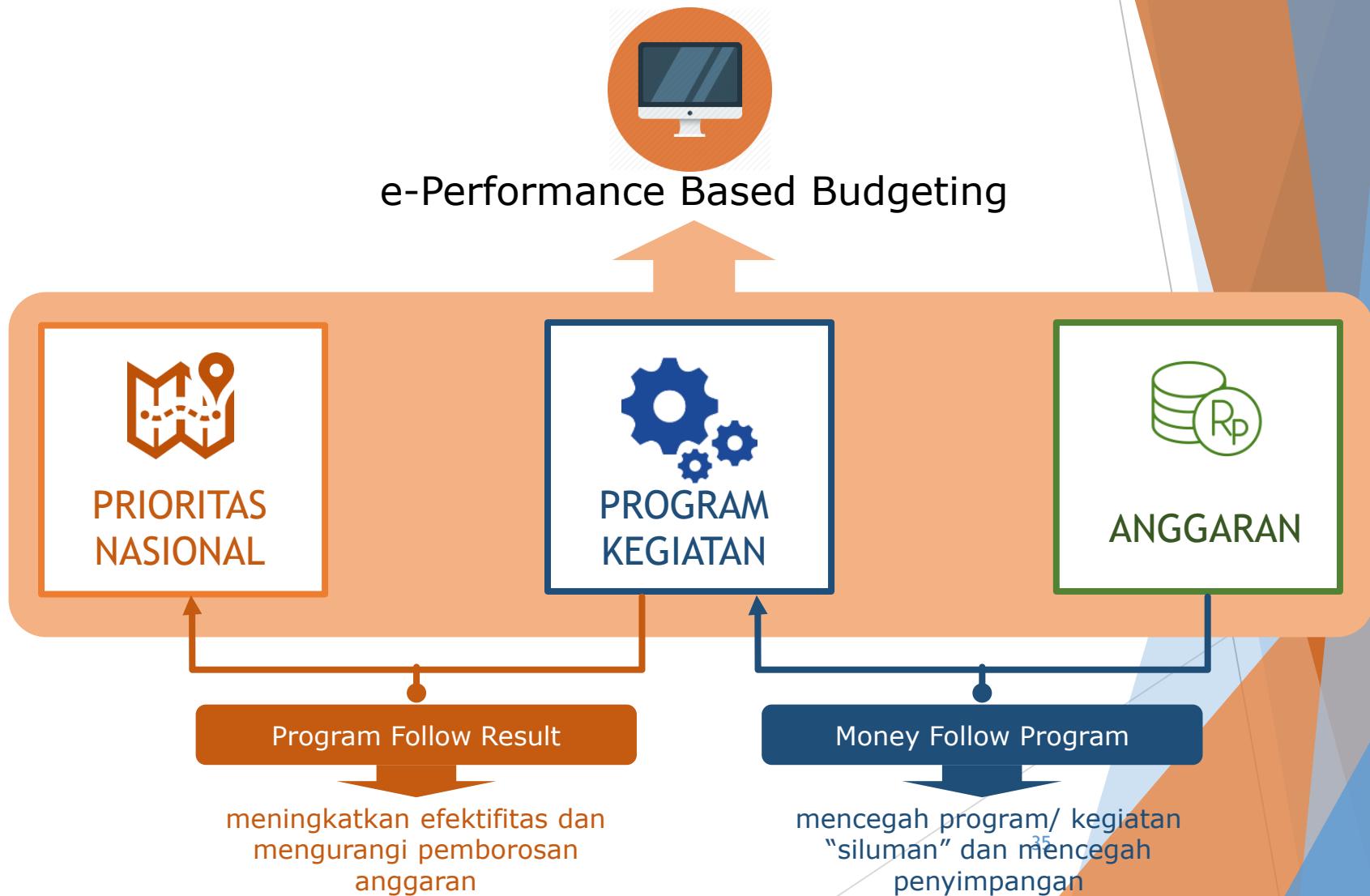


PENGGUNAAN ANGGARAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN UNTUK MEWUJUDKAN HASIL YANG DIHARAPKAN OLEH MASYARAKAT

# e-Budgeting



# e-Performance Based Budgeting



# e-Performance Based Budgeting



Akuntabilitas Kinerja

e-Budgeting



Mencegah program/  
kegiatan “siluman”  
dan mencegah  
penyimpangan

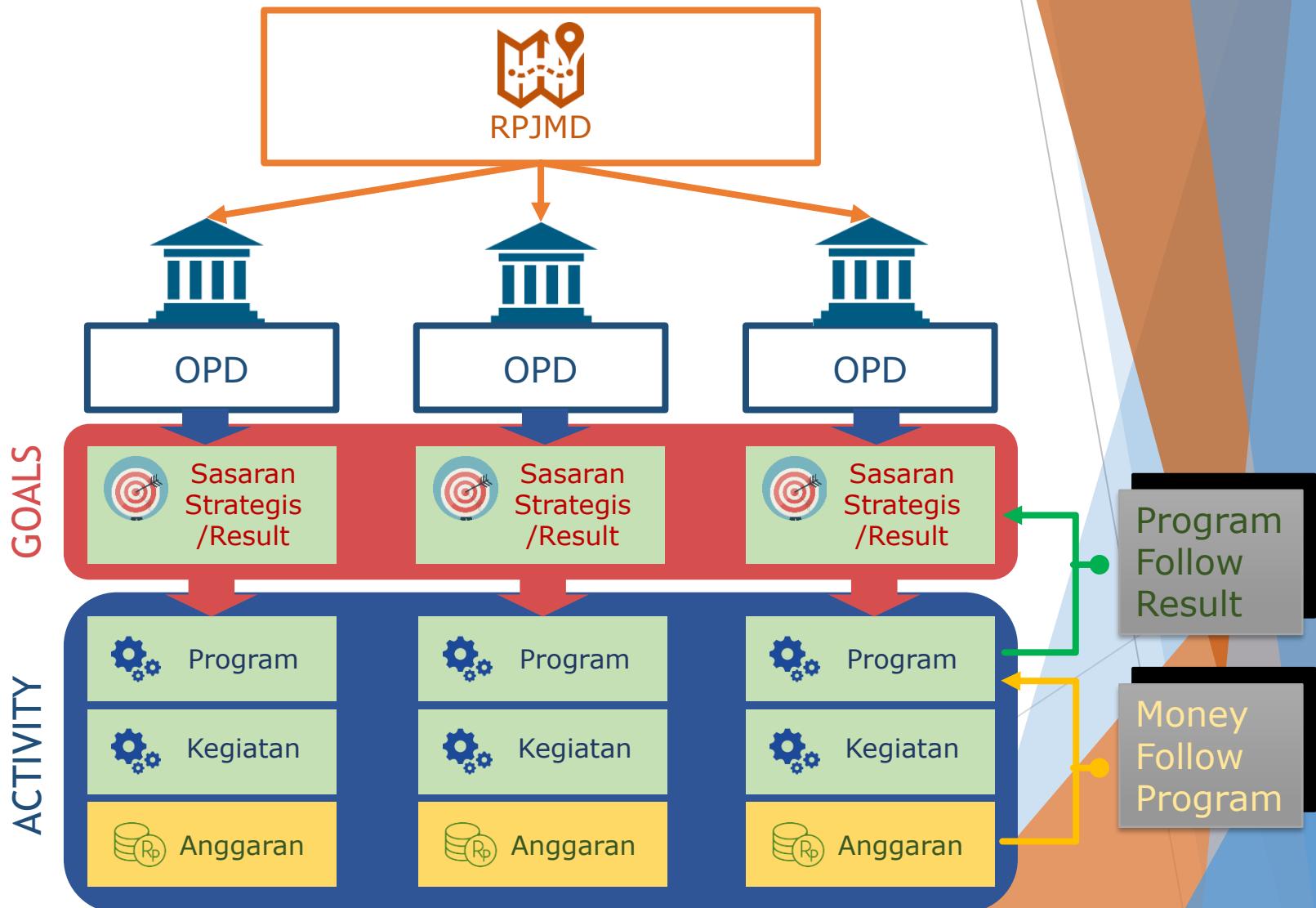


Mencegah  
pemborosan dan  
meningkatkan  
efektifitas dan  
efisiensi penggunaan  
anggaran



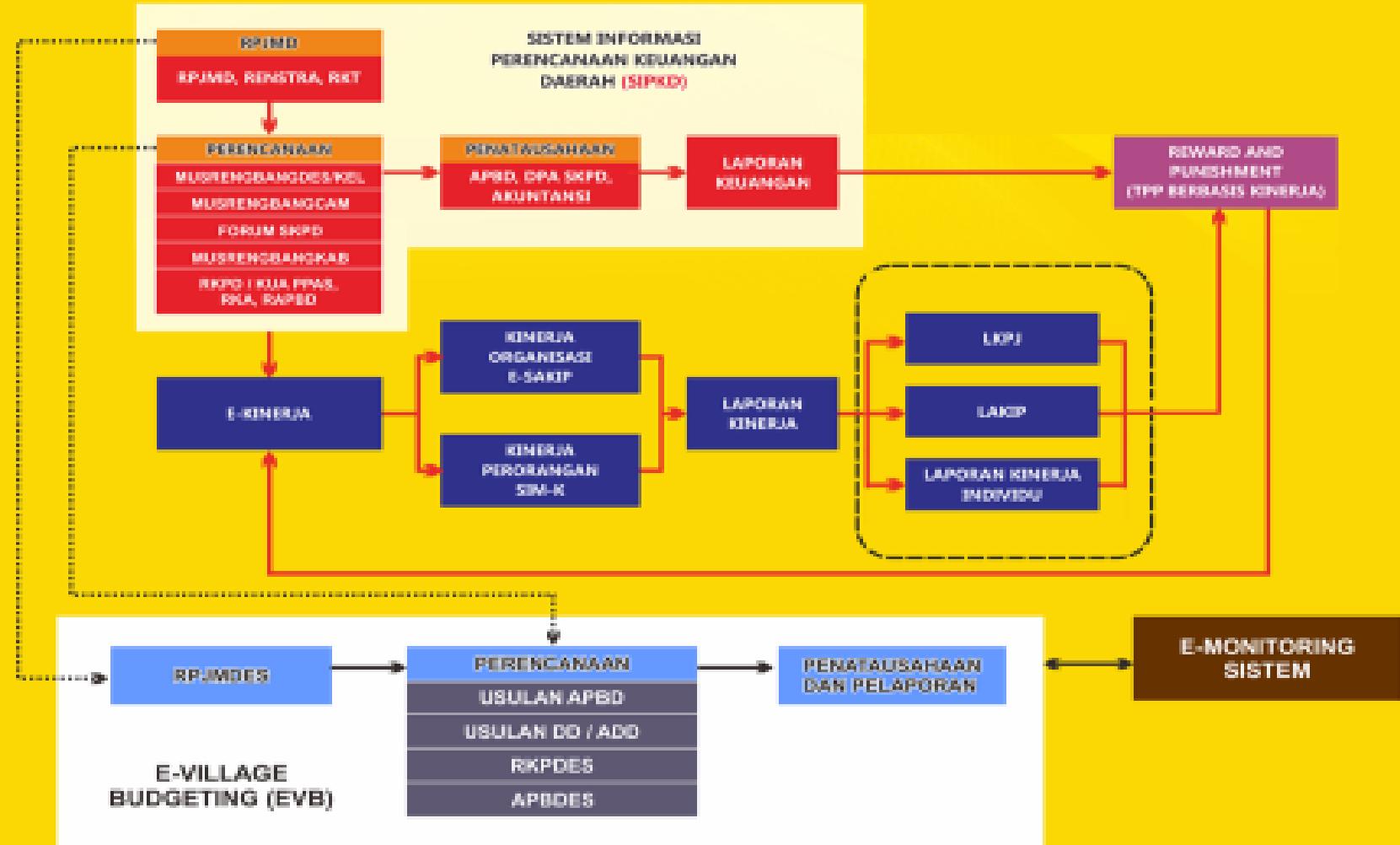
ASN tidak disibukkan  
dalam pekerjaan  
dokumentatif namun  
berfokus pada kinerja  
yang akan diwujudkan

# Integrasi Perencanaan, Keuangan, dan Kinerja

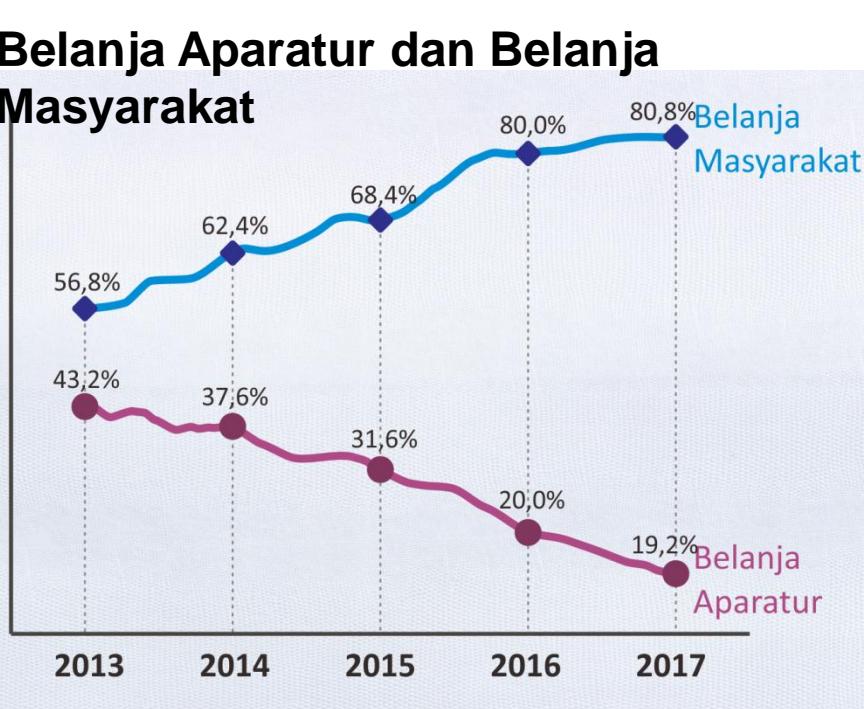


# CONTOH BETTER PRACTICES KABUPATEN BANYUWANGI

## E-PERFORMANCE BASED BUDGETING



## Belanja Aparatur dan Belanja Masyarakat

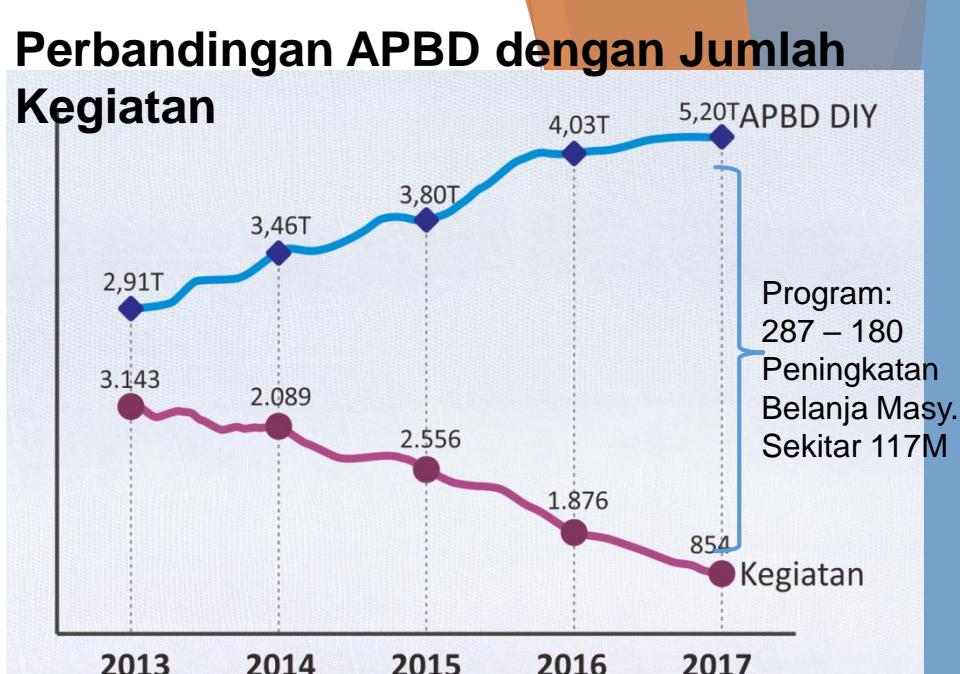


Keterangan:  
Belanja Masyarakat: Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

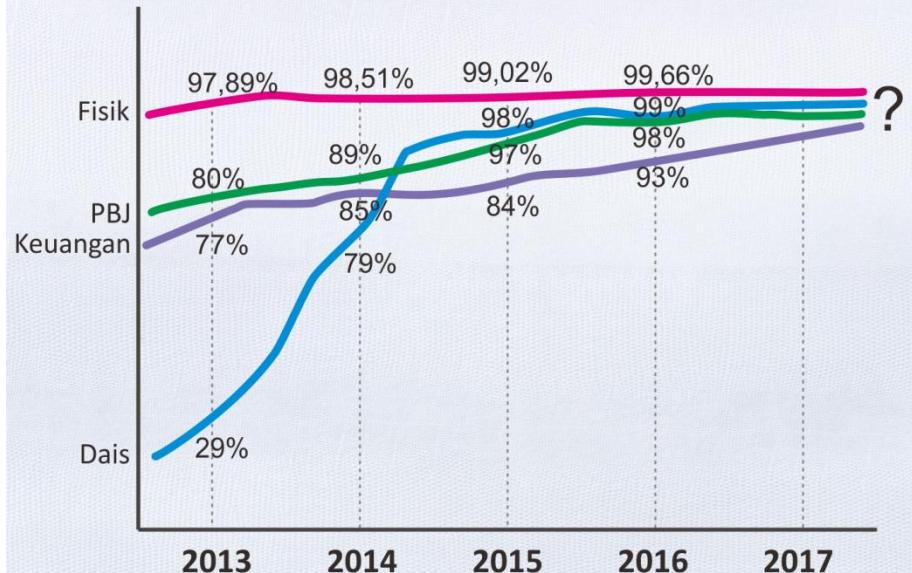
Belanja Aparatur: Gaji, Take Home Pay, Belanja Pendukung, Administrasi Perkantoran



## Perbandingan APBD dengan Jumlah Kegiatan



## Kinerja Pelaksanaan APBD 2013-2017



# Manfaat PENERAPAN SAKIP



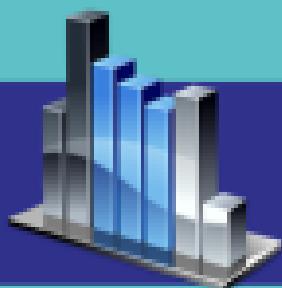
1 Efektivitas penggunaan anggaran untuk pencapaian target kinerja  
► Penyederhanaan program/konversi program



2 Adanya ukuran kinerja individu untuk pemberian reward and punishment

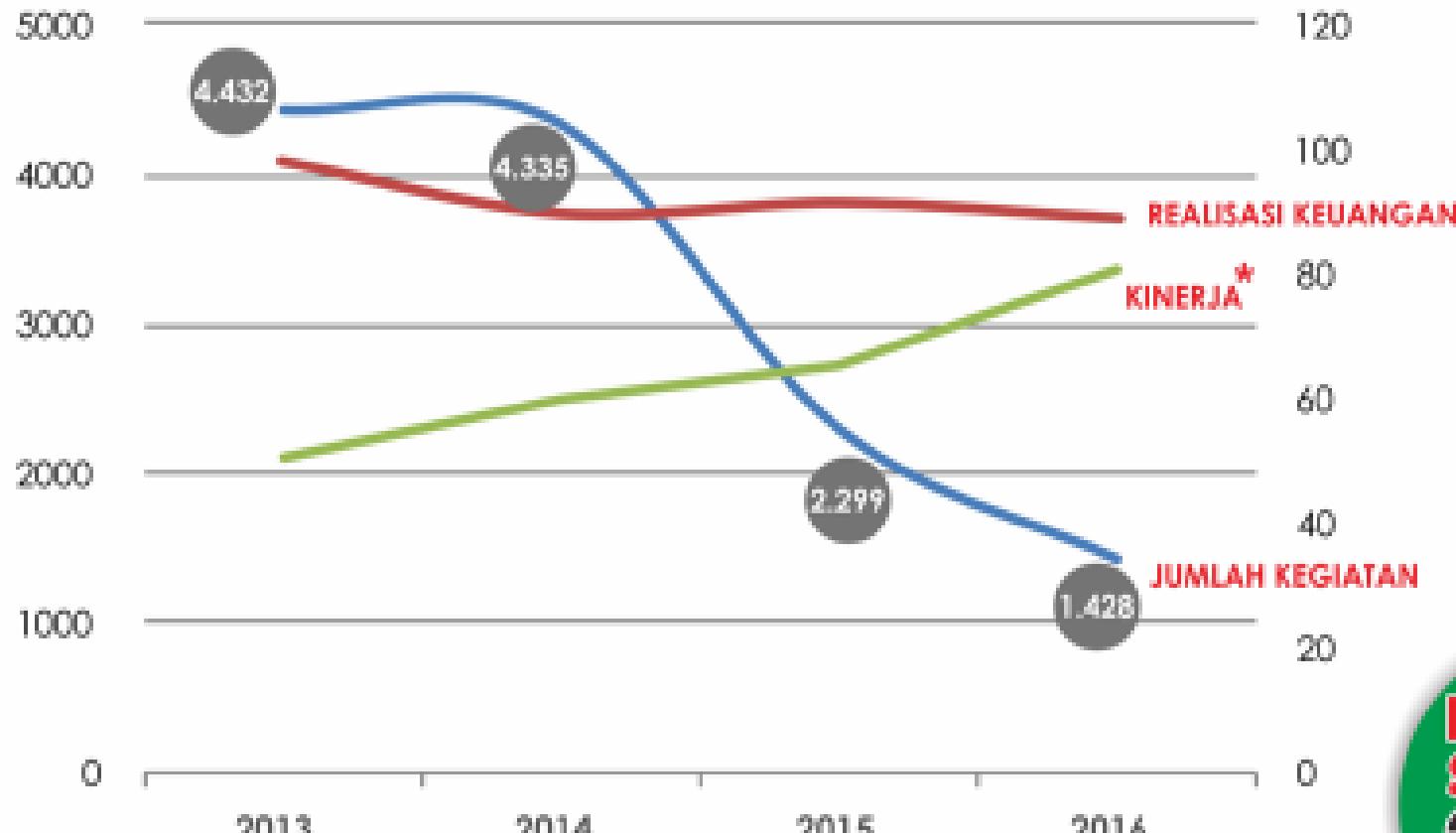


3 Penyederhanaan pelaporan (one input for all)



# EFEKTIFITAS

PENGGUNAAN  
ANGGARAN

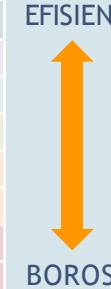


# EFISIENSI BIROKRASI MELALUI SAKIP

## HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KATEGORI		Kementerian/ Lembaga				Pemerintah Provinsi				Kabupaten / Kota			
Kategori	Ran ge Nila i	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
AA	90-100	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
A	80-90	4	4	6	5	2	3	4	4	1	2	2	9
BB	70-80	21	27	26	31	7	7	6	6	7	10	30	40
B	60-70	36	37	40	42	8	12	19	18	31	57	139	185
CC	50-60	16	11	7	3	13	10	5	5	172	199	174	162
C	30-50	0	3	3	2	3	2	0	0	239	193	135	97
D	0-30	0	0	0	0	1	0	0	0	14	14	3	5

KATEGORI	
Kategori	Range Nilai
AA	90-100
A	80-90
BB	70-80
B	60-70
CC	50-60
C	30-50
D	0-30



Menggambarkan kemampuan instansi dalam:

- Mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran;
- Menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas;
- Menghemat anggaran melalui kegiatan yang berdampak langsung bagi pencapaian sasaran pembangunan.



### EFISIENSI DISEBABKAN OLEH:

1. Perumusan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. *Re-focusing* (pengurangan) Program/Kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan tersebut;
3. Upaya *cross-cutting* program dan kegiatan sehingga terwujud sinergitas (kolaborasi) antar-instansi.

# EFektivitas Penggunaan Anggaran Untuk pencapaian Target Kinerja

## Konversi Program

BEFORE

5

MISI

MISI 1

MISI 2

DST

7

TUJUAN

TUJUAN

TUJUAN

DST

DST

42

SASARAN

222 INDIKATOR SASARAN

SASARAN

SASARAN

DST

DST

278

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

DST

DST

AFTER

5

MISI

MISI 1

MISI 2

DST

9

TUJUAN

TUJUAN

TUJUAN

DST

DST

22

SASARAN

44 INDIKATOR SASARAN

SASARAN

SASARAN

DST

DST

213

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

DST

DST

PROGRAM BERKURANG 23%

2299

KEGIATAN

KEGIATAN

KEGIATAN

DST

DST

1428

KEGIATAN

KEGIATAN

KEGIATAN

DST

DST

KEGIATAN BERKURANG 38%

# IMPLEMENTASI BUDAYA KINERJA

## ILUSTRASI IMPLEMENTASI BUDAYA KINERJA



Cascading kinerja sudah sangat baik, sehingga setiap pejabat/pegawai tahu kinerja Kab/Kota mana yang akan dituju setiap kegiatan yang dilakukan 1

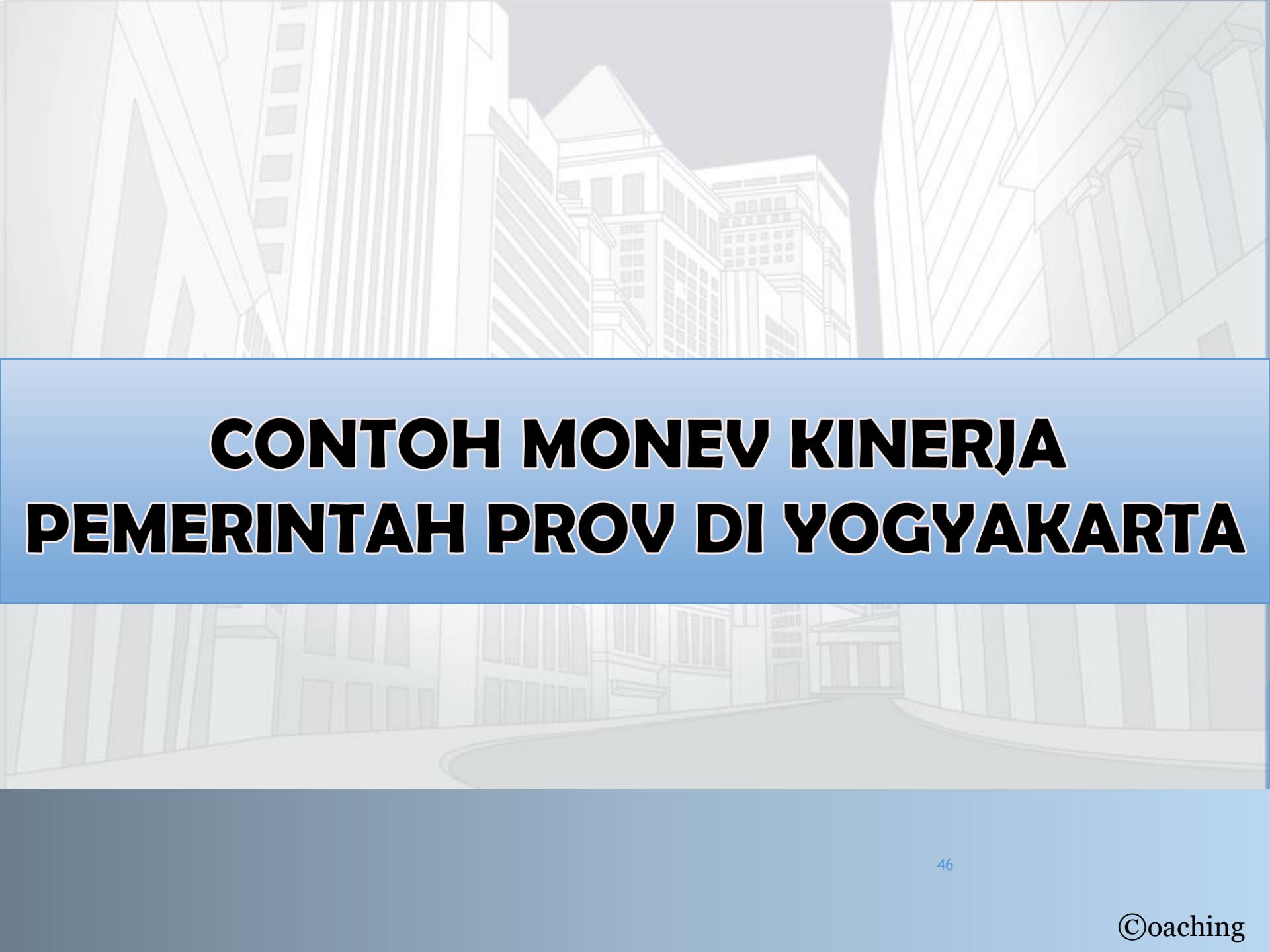
Monev Kinerja langsung oleh Kepala Daerah secara berkala; 2

Penilaian kinerja Perangkat Daerah dijadikan dasar dalam pemberian reward & punishment terhadap Perangkat Daerah; 3

Adanya penilaian kinerja individu yang terkait langsung dengan kinerja organisasi dan dijadikan dasar pemberian tunjangan kinerja; 4

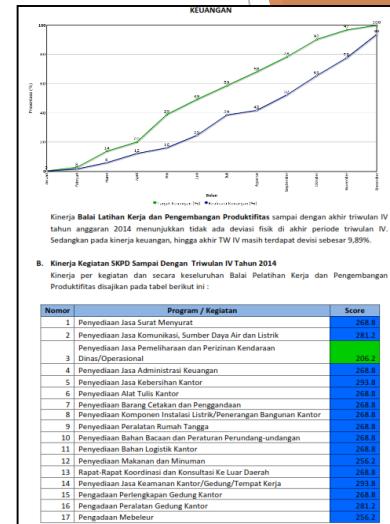
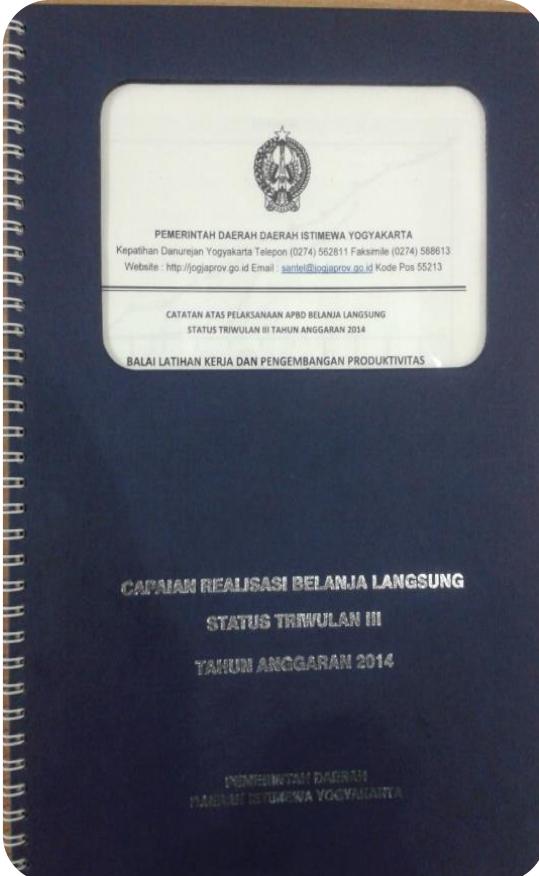
Ego sektoral OPD sudah minim dan *mind set* pejabat/pegawai berorientasi kinerja Kabupaten/Kota, bukan lagi hanya semata2 berorientasi kinerja OPD masing-masing; 5

Dapat mencontoh implementasi budaya kinerja pada Prov/Kab/Kota yang sudah mendapatkan predikat BB & A. 6



# **CONTOH MONEV KINERJA PEMERINTAH PROV DI YOGYAKARTA**

# PENILAIAN KINERJA OPD



Nomor	Program / Kegiatan	Score
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	268,8
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	293,8
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	268,8
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	268,8
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelleur	268,8
23	Reparasi/Renovasi/Berkala Gedung Kantor	293,8
24	Pelatihan Keterampilan Administrasi Bagi Pencari Kerja	268,8
25	Pelatihan Keterampilan Keling Model Training Unit (MTU)	256,0
26	Pelatihan Keterampilan Swadaya	293,8
27	Pelatihan Keterampilan Teknologi Tepat Guna untuk Usaha Mandiri	281,2
28	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	268,8
29	Sertifikasi Uji Kompetensi Bagi Pencari Kerja	293,8
30	Desain dan Pengembangan Bagi Tenaga Kerja Perusahaan	268,8
31	Akreditasi Manajemen Mutu Sesuai ISO	293,8
<b>Rata - Score</b>		<b>272</b>

Secara keseluruhan nilai kinerja Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas adalah 272 yang dapat dikategorikan sebagai Sangat Baik

**C. Catatan dan Rekomendasi :**  
Terhadap kinerja triwulan IV tahun 2014, Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas secara keseluruhan masih memerlukan perbaikan dalam beberapa hal.

- Kinerja Fisik**
  - Perilaksan Kegiatan (RKP)
  - Secara umum keseluruhan RKP kegiatan telah disusun dengan baik sehingga dapat dipergunakan oleh SKPD sebagai acuan dan monore perkiraan kegiatan yang dimaksud, namun masih ada beberapa kegiatan yang RKPnya belum menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan dengan baik.
  - Perilaksan Kegiatan
  - Secara umum pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana shapaktifitas dalam RKP yang ditujukan dengan realisasi fisik kegiatan yang telah mendekati dengan target yang telah ditetapkan.
  - Identifikasi Risiko
- Kinerja Keuangan**
  - SKPD telah membuat laporan progres kegiatan sesuai dengan format Moner secara rutin, lengkap serta terstruktur dari setiap tahapan kegiatan, sehingga tahapan/progres dari pelaksanaan kegiatan dapat terlihat secara jelas.
  - Deviasi kinerja yang terjadi pada Triwulan IV sebesar 9,89 % dikontribusikan oleh faktor efisiensi dari kegiatan-kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan. Sampai dengan triwulan IV sudah cukup banyak kegiatan yang dapat dislesaikan dengan realisasi fisik sebesar 100%. Terhadap hal yang demikian disampaikan apresiasi

b. Sedangkan untuk deviasi yang disebabkan oleh ketentuan administrasi kegiatan, diharapkan dapat dilakukan perbaikan penyeliasan administrasi kegiatan.

**Rekomendasi:**  
Menyusun hasil laporan Kinerja Triwulan III di atas kami menekankan kepada Kapela BLKPP beserta seluruh jajaran agar meningkatkan optimasi pelaksanaan kegiatan, seiring perbaikan tersebut.

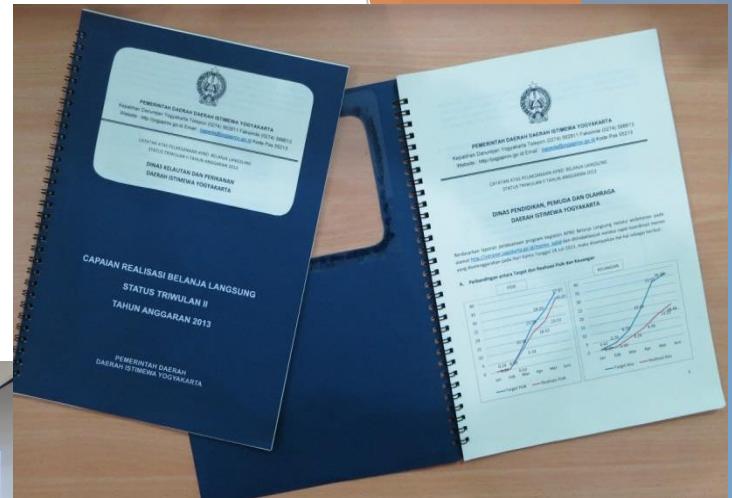
- Kinerja Fisik**
  - Menyusun rancangan kegiatan bagi RKP yang belum mengandung proses perencanaan kegiatan dengan baik, tenteng kendamaan untuk RKP yang semakin ini dapat dilakukan perbaikan pada perencanaan.
  - Miskon deviasi fisik hanya sebesar 1%, namun diharapkan untuk dapat lebih meningkatkan kinerja agar deviasi tersebut semakin menurun dan mencapai target yang telah ditetapkan.
- Kinerja Keuangan**
  - Diambilkan apresiasi untuk deviasi yang disebabkan faktor ketentuan administrasi diharapkan dapat dilakukan perbaikan administrasi.

Seharusnya secara umum kami sampaikan untuk dilaksanakan pengendalian internal yang tigor agar pelaksanaan kegiatan sampai akhir tahun dapat dilakukan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Kami sampaikan apresiasi dan termasuk bahwa pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik, adapun terkait dengan masih adanya ketentuan administrasi yang masih belum dilakukan sebaiknya dilakukan segera disesuaikan dengan pihak-pihak terkait.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagai acuan.

Yogyakarta, 14 Oktober 2014  
J.A. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SAHARUDIN,  
S.E., M.Si.  
IKA, ICHSANUR  
NIP. 59565121980310

# Pemberian Rapor Triwulan oleh Gubernur DI YOGYAKARTA



# AKUNTABILITAS KINERJA

Top News | Rilis Pers | Temdak Kalitri | Ketidaktuan Pengguna



## Kepala SKPD diharapkan bekerja inovatif dan kreatif

Kamis, 24 Juli 2014 20:57 WIB

Oleh Bambang Sutopo Hadi



Sri Sultan HB X (Foto: Antara/Noveradika)

Yogyakarta (Antara Jogja) - Para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diharapkan bekerja secara inovatif kreatif, tetapi tetap berdasarkan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.

"Dalam menilai kinerja, saya juga berpandangan tidak sekadar mementingkan aspek serapannya saja tetapi juga faktor fisik dan ketepatan," kata Gubernur



Pemerintah > Pemerintah

### Kunci Keberhasilan Pembangunan Tidak Sekedar Aspek Serapan

Kamis, 24 Juli 2014 09:07



Gubernur DIY menyerahkan rapor triwulan II pada SKPD berkinerja terbaik dan terburuk. Foto:

Siswanto.

Untuk itu, Sri Sultan berharap para kepala SKPD berkinerja terbaik dan terburuk dengan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Sri Sultan juga berharap untuk bersama-sama membangun DIY melalui upaya koordinasi yang lebih baik.

## Xedauutan Rakyat online

KR.JOGJA.COM

LOKAL NASIONAL PENDIDIKAN EKONOMI OLAHRAGA TEKNOLOGI

Indeks | Citizen Journalism | Internasional | Kriminal | Info Haji | Cerita Misteri | Opini

## Sultan Beri 'Rapor Merah' Sekwan DIY

Antara | Jumat, 10 Januari 2014 | 19:51 WIB | Dihajar: 958 | Komentar: 0

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn



emda DIY  
Indonesia

Presiden

Presiden

Presiden

Presiden

Sesuai rapor penilaian pada SKPD tersebut, dinkomendasi agar hadap pihak penjadwal ruang pasien untuk dapat dilakukan upaya percepatan agar beban kerja semakin terakumulasi pada triwulan berikutnya. Terhadap kegiatan dengan pagu anggaran yang besar, kassa pengguna anggaran diminta untuk memakan agar dapat dilaksanakan dengan tepat waktu.

Kendati begitu untuk kegiatan-kegiatan yang di luar kendali, Raport memberikan catatan khusus pada setiap kualitas/pengguna anggaran. Kegiatan yang di luar kendali seperti pendampingan dari pusat namun tidak dalam pendanaannya, atau berbentuk bantuan di luar kewenangan seperti pengadaan pupuk yang batal dilakukan karena perubahan mendadak akibat cuaca atau iklim.

Pun pada target dan realisasi keuangan deviasi yang lebih besar terjadi pada kegiatan-kegiatan dengan pagu anggaran yang relatif besar.

Padahal pada target dan realisasi keuangan deviasi yang lebih besar terjadi pada kegiatan-kegiatan dengan pagu anggaran yang relatif besar.

Pun pada target dan realisasi keuangan deviasi yang lebih besar terjadi pada kegiatan-kegiatan dengan pagu anggaran yang relatif besar.

Pun pada target dan realisasi keuangan deviasi yang lebih besar terjadi pada kegiatan-kegiatan dengan pagu anggaran yang relatif besar.

Pun pada target dan realisasi keuangan deviasi yang lebih besar terjadi pada kegiatan-kegiatan dengan pagu anggaran yang relatif besar.

Pun pada target dan realisasi keuangan deviasi yang lebih besar terjadi pada kegiatan-kegiatan dengan pagu anggaran yang relatif besar.

Pun pada target dan realisasi keuangan deviasi yang lebih besar terjadi pada kegiatan-kegiatan dengan pagu anggaran yang relatif besar.

Pun pada target dan realisasi keuangan deviasi yang lebih besar terjadi pada kegiatan-kegiatan dengan pagu anggaran yang relatif besar.

Pun pada target dan realisasi keuangan deviasi yang lebih besar terjadi pada kegiatan-kegiatan dengan pagu anggaran yang relatif besar.

Pun pada target dan realisasi keuangan deviasi yang lebih besar terjadi pada kegiatan-kegiatan dengan pagu anggaran yang relatif besar.

Pun pada target dan realisasi keuangan deviasi yang lebih besar terjadi pada kegiatan-kegiatan dengan pagu anggaran yang relatif besar.

Pun pada target dan realisasi keuangan deviasi yang lebih besar terjadi pada kegiatan-kegiatan dengan pagu anggaran yang relatif besar.

Pun pada target dan realisasi keuangan deviasi yang lebih besar terjadi pada kegiatan-kegiatan dengan pagu anggaran yang relatif besar.

Pun pada target dan realisasi keuangan deviasi yang lebih besar terjadi pada kegiatan-kegiatan dengan pagu anggaran yang relatif besar.

Pun pada target dan realisasi keuangan deviasi yang lebih besar terjadi pada kegiatan-kegiatan dengan pagu anggaran yang relatif besar.

**SEKIAN DAN TERIMA KASIH**

Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur  
dan Pengawasan, Kementerian PAN & RB

Jl. Jenderal Sudirman kav. 69.  
Jakarta 12100. Telp. (021)7398341.

[www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)